

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan negara yang tidak mudah diatasi karena angkanya menunjukkan tren peningkatan, berdasarkan total penduduk miskin di Indonesia yang relatif tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut telah terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang, angka kemiskinan masih mengalami peningkatan. Kemiskinan merupakan situasi pada individu atau kelompok masyarakat dalam suatu daerah secara alami, kultural, atau struktural tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sejalan dengan prinsip-prinsip atau norma yang diterapkan dalam masyarakat tersebut (Yustitia *et al.*, 2022). Kemiskinan dilihat dari sudut pandang wilayah memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk upaya pengentasan kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi dengan tingkat keparahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi tantangan besar pembangunan pada masalah sosial ekonomi yang memerlukan perhatian serius guna menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun (2022) telah menjadikan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai isu strategis nasional hingga nol persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem dipahami sebagai kondisi masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah USD 1,9 per hari

sesuai standar internasional (Taufik *et al.*, 2020). Target yang tinggi diharuskan untuk dilakukan dalam upaya yang sungguh-sungguh dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kemiskinan ekstrem tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi dapat berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Rumah tangga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak serta akses terhadap lapangan kerja yang produktif, sehingga menyebabkan kemiskinan struktural dan meningkatkan risiko kemiskinan berlanjut ke generasi berikutnya (Todaro & Smith, 2012). Tingginya tingkat kemiskinan ekstrem dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperluas ketimpangan sosial, serta menurunkan ketahanan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan (Pribadi & Marsono, 2024)

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan ketenagakerjaan akibat peningkatan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga sebagian tenaga kerja belum terserap secara optimal. Indikator kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonominya, apabila pertumbuhan berjalan dengan baik maka sektor-sektor lain cenderung terdorong untuk berkembang (Nafi'ah *et al.*, 2025). Kondisi tersebut diperparah dengan tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang belum merata, sehingga banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja (Sagara *et al.* 2025).

Menurut Yamanie & Simangunsong (2025) berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia yakni mencapai 55-56 persen dari total penduduk nasional. Menurut BPS (2025) pada tahun 2021 kontribusi Pulau Jawa terhadap PDRB nasional cukup signifikan, yakni sebesar 58,49 persen. Situasi ini disebabkan oleh dominasi aktivitas ekonomi Indonesia yang masih berpusat di Pulau Jawa. Faktor geografis yang strategis, jalur perdagangan internasional, serta ketersediaan infrastruktur yang baik menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat utama perekonomian.

Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan luas 48.036,84 kilometer persegi (BPS, 2024). Jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 41.149.974 jiwa yang menempati peringkat kedua di Pulau Jawa setelah provinsi Jawa Barat tercatat sekitar 49,9 juta jiwa. Selain itu, jumlah penduduk provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun 2023 yaitu Jawa Tengah sebesar 37,4 juta jiwa, Banten 12,2 juta jiwa, DKI Jakarta 10,7 juta jiwa, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 3,8 juta jiwa (Statistik, 2023). Kondisi tersebut mencerminkan luasnya skala demografis Provinsi Jawa Timur yang berdampak langsung pada proses pembangunan ekonomi, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, penetapan upah minimum, serta peran sektor industri dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

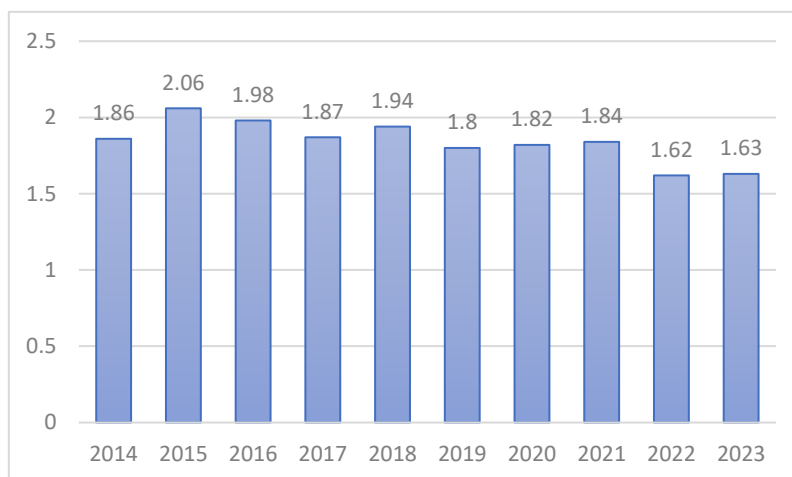
Sebagian penduduk di Provinsi Jawa Timur masih hidup pada tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar meskipun secara makro kinerja perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif baik (Haryanto *et al.*, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan dalam

distribusi pendapatan serta akses terhadap kesempatan kerja yang layak, oleh sebab itu kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur masih bersifat struktural yang belum teratasi secara optimal oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi kemiskinan ekstrem yang bersifat struktural akan semakin meningkat apabila seiring besarnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur, sementara kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai di seluruh lapisan masyarakat.

Tingginya jumlah penduduk tersebut menjadikan Jawa Timur menunjukkan potensi sumber daya manusia yang relatif besar, namun hal ini menimbulkan tantangan dalam hal pemerataan kesejahteraan. Sejalan dengan pemikiran Malthus (1798) dalam karyanya "*An Essay on the Principle of Population*", pertumbuhan penduduk yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja dan sumber daya ekonomi yang dapat menimbulkan tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan kemiskinan serta kelaparan, yang pada akhirnya membatasi jumlah penduduk melalui mekanisme alami seperti kelaparan, penyakit, dan konflik (Nurdahniar *et al.*, 2025).

Meskipun secara ekonomi Jawa Timur tergolong sebagai provinsi dengan basis industri yang kuat, permasalahan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem tetap menjadi masalah yang serius. Perkembangan sektor industri yang relatif kuat belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan yang merata di Provinsi Jawa Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan (Pamuji, 2019). Berikut ini

perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 sampai 2023 :



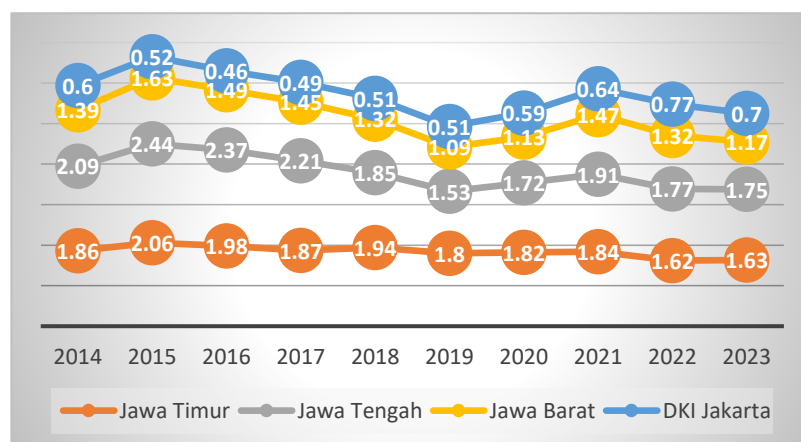
Gambar 1. 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun, 2025 (diolah Peneliti)

Gambar 1.1 di atas merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang mengindikasikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Timur yang terlihat cenderung mengalami tren penurunan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2014 nilai P1 tercatat sebesar 1,86 persen kemudian meningkat hingga 2,06 persen pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat kesejahteraan penduduk miskin menunjukkan adanya perbaikan dan semakin jauh dari batas kemiskinan. Terjadi fluktuasi pada masa pandemi pada tahun 2021 sebesar 1,84 persen, namun kemudian menurun menjadi 1,62 pada tahun 2023, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang melemahkan perekonomian dan mengurangi pendapatan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Jawa Timur semakin berkurang, kemampuan konsumsi penduduk miskin berada di kisaran nilai garis kemiskinan sehingga kesenjangan antara kelompok miskin dan garis

kemiskinan semakin kecil. Adanya perbaikan kesejahteraan penduduk miskin seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Secara historis diperlukan untuk melihat posisi Provinsi Jawa Timur dengan provinsi besar lain di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, serta DKI Jakarta. Provinsi tersebut dipilih guna sebagai referensi perbandingan karena memiliki karakteristik serta kontribusi ekonomi yang signifikan. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua, setelah Jawa Tengah pada posisi pertama dan Jawa Barat pada posisi ketiga (Prasetya & Sumanto, 2022). Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah tidak hanya bergantung pada besarnya pengeluaran pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat investasi yang ada di negara tersebut (Yasir *et al.*, 2024). Perbandingan ini akan memberikan gambaran terkait tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengikuti tren yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa atau justru akan menampilkan perbedaan yang cukup besar. Berikut ini merupakan perbandingan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta DKI Jakarta



Gambar 1. 2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun, 2024 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa, secara umum di empat provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta DKI Jakarta menunjukkan tren penurunan namun dengan tingkat yang berbeda. Jawa Timur memiliki nilai P1 lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, namun lebih tinggi daripada Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penurunan secara fluktuatif dari tahun 2014 sebesar 1,86 persen menjadi 1,63 persen pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan perkembangan sektor industri berperan penting dalam menurunkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Meskipun keempat provinsi tersebut mengalami kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2014 ke 2015, kesenjangan antara wilayah masih terlihat dari perbedaan nilai dan pola perubahan P1 antar provinsi. Perbedaan nilai serta pola perubahan P1 antar provinsi tersebut menunjukkan bahwa proses penurunan kemiskinan di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Secara teoritis, sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi serta memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap *output*, pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja, sehingga menjadikannya sebagai sektor unggulan dalam perekonomian nasional (Pitaloka *et al.*, 2020).

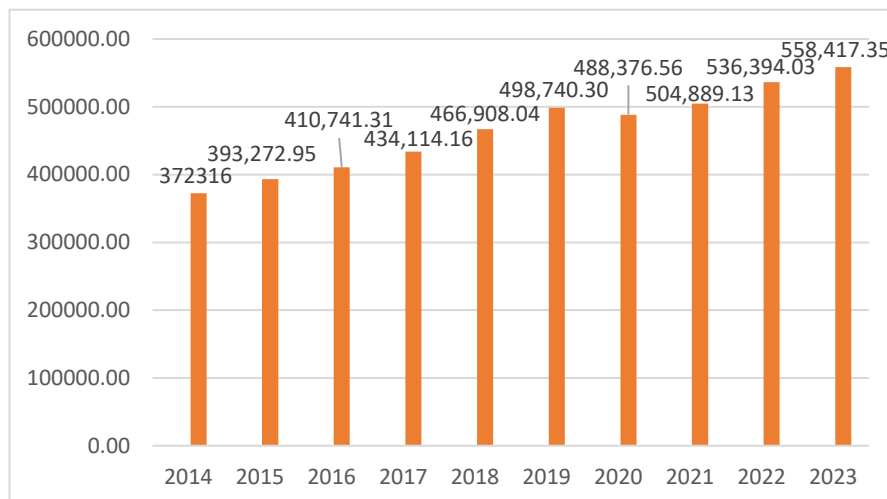
Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri harus disertai dengan upaya yang efektif dalam memberdayakan tenaga kerja. Pengangguran banyak terjadi karena jumlah angkatan kerja yang besar apabila tidak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu, serta tersedianya antara kemampuan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan

yang tersedia (Yustitia *et al.* 2022). Apabila jumlah tenaga kerja mampu terserap dengan baik maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Sejalan dengan pemikiran Todaro & Smith (2012) penciptaan lapangan kerja yang produktif merupakan suatu strategi pengurangan kemiskinan, karena tanpa pekerjaan sebagian besar penduduk miskin akan kehilangan sumber pendapatan utamanya.

Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dilihat dari besarnya selisih rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan (Safhira *et al.*, 2023). Indikator ini menunjukkan bahwa seberapa jauh kondisi masyarakat miskin tertinggal dari standar hidup minimum yang telah ditetapkan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan (P1), maka taraf hidup masyarakat miskin semakin melemah sehingga perlunya upaya yang lebih efektif dalam mendorong mereka dari kemiskinan (Purwantini & Rusastra, 2015). Permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat dinilai berdasarkan jumlah orang miskin, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kedalaman kemiskinan yang dialami masyarakat sehingga upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan dengan peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif.

Secara makro pembangunan ekonomi suatu negara didukung oleh tiga sektor utama yakni pertanian, industri, serta jasa. Sektor industri dianggap menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, karena berperan dalam menciptakan nilai tambah yang besar, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta melihat tumbuhnya inovasi teknologi. Sektor industri

pengolahan berperan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian di provinsi Jawa Timur.



Gambar 1. 3 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023 (Milyar)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun, 2023 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa nilai PDRB sektor industri pengolahan dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan meskipun mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Pada awal tahun 2014 PDRB tercatat 372.316 Milyar, kemudian terjadi peningkatan hingga mencapai 558.417,35 Milyar. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 ditandai sebagai dampak dari situasi global yang mempengaruhi banyak sektor, namun peningkatan terjadi lagi pada tahun 2021 hingga tahun 2023, kemampuan sektor industri pengolahan mampu untuk bertahan dan beradaptasi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor tersebut berperan penting dalam perekonomian di Jawa Timur.

Kemampuan sektor industri pengolahan mampu untuk bertahan dan beradaptasi, sejalan dengan teori Industrialisasi yang dikemukakan Chenery (1973), tingginya kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan

adanya peran penting sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Sektor industri akan terus menyerap tenaga kerja dan proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor-sektor non-pertanian (industri atau jasa) akan terus berlangsung angka perpindahan akan menyebabkan penurunan produksi bagi pekerja di sektor pertanian (Hubbansyah *et al.*, 2023). Proses ini mengindikasikan terjadinya perubahan struktural ekonomi, pergeseran tenaga kerja menuju ke sektor berproduktivitas tinggi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.

Penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Menurut teori *Dual Sector Model*, semakin besar tenaga kerja yang terserap ke sektor modern (industri) maka produktivitas meningkat dan tingkat kemiskinan akan menurun (Lewis, 1954). Laju pertumbuhan angkatan kerja apabila tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Keterbatasan kesempatan kerja yang ada serta tingginya jumlah angkatan kerja menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja (Yustitia *et al.*, 2022). Oleh karena itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator penting untuk menunjukkan dinamika penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan mengindikasikan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang secara langsung dapat mempengaruhi peluang kerja serta berpotensi dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Sehingga kondisi ini dapat dilihat melalui data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen)
2014	68.12	1.86
2015	67.84	2.06
2016	66.14	1.98
2017	68.78	1.87
2018	69.56	1.94
2019	69.61	1.8
2020	70.33	1.82
2021	70	1.84
2022	71.23	1.62
2023	72.56	1.63

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun, 2024 (diolah Peneliti)

Tabel 1.1 menggambarkan adanya kecenderungan hubungan yang menarik antara kedua variabel yakni TPAK dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Jawa Timur. TPAK Jawa Timur mengalami ketidakstabilan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Peningkatan TPAK dapat memperluas peluang pendapatan melalui peningkatan pendapatan apabila diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, yang akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun tertentu. Tren tersebut menunjukkan bahwa belanja masyarakat berpendapatan rendah semakin mendekati garis kemiskinan yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi di Jawa Timur semakin menurun. Ketika pendapatan yang dimiliki oleh banyak masyarakat, maka secara bertahap masyarakat akan mampu keluar jadi kondisi kekurangan atau kemiskinan (Yustitia *et al.*, 2022).

Harga dasar (*floor price*) yang bersifat mengikat akan menimbulkan surplus seperti halnya upah minimum, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dari kebutuhan sehingga menimbulkan pengangguran (Mankiw, 2007). Dengan demikian, upah minimum bersifat ganda, yakni dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan apabila mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja, namun berdampak buruk yang akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Di sisi lain, upah minimum berperan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dengan pendapatan rendah. Menurut Mankiw dalam Buchari, (2016) pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi saat menentukan upah minimum agar tercapai keseimbangan antara *demand* dan *supply* di pasar tenaga kerja.

Tabel 1. 1 Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
2014	1,000,000	4.19
2015	1,000,000	4.47
2016	-	4.21
2017	1,388,000	4.00
2018	1,508,895	3.91
2019	1,630,059.05	3.82
2020	1,768,777	5.84
2021	1,868,777.08	5.74
2022	1,891,567.12	5.49
2023	2,040,244.3	4.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo (2025), Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2025) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun (2013), diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa upah minimum Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014 hingga 2023, sementara Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan teori *Dual Sector Model*, perekonomian terdiri atas sektor tradisional dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah dan sektor modern dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Peningkatan upah minimum mencerminkan perkembangan sektor modern, namun fluktuasi pada TPT mengindikasikan bahwa proses penyerapan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern masih belum optimal. Peningkatan TPT pada tahun 2020-2021 mencerminkan keterbatasan daya serap sektor industri terhadap tenaga kerja karena perlambatan aktivitas perekonomian. Upah minimum dan TPT di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam proses transformasi struktural antar sektor, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Menurut Hutagaol *et al.*, (2024) pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah dengan cara meningkatkan upah minimum serta menyediakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi atau sumber daya yang produktif.

Efektivitas kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada kemampuan sektor industri dan lapangan usaha untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang memadai. Keterbatasan dengan banyaknya kesempatan kerja menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang melekat, sehingga berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran (Pribadi & Marsono, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja melalui sektor industri menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, perkembangan sektor industri berkontribusi besar dalam

menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Yustitia *et al.*, (2022) yang mengemukakan bahwa penyerapan tenaga berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, apabila jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat sehingga kemiskinan cenderung menurun.

Beberapa riset terdahulu telah membahas keterkaitan antara penyerapan tenaga kerja dengan kemiskinan (Yustitia *et al.*, 2022) maupun peran sektor industri sebagai penggerak ekonomi (Pitaloka *et al.*, 2020). Namun, penelitian ini yang secara komprehensif menggabungkan variabel perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur masih relatif sedikit. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan kebaruan dengan melakukan analisis secara parsial terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan ekstrem di Jawa Timur selama tahun 2014 hingga 2023, sehingga diharapkan memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dan relevan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan fenomena data yang ada menjadi daya tarik penulis untuk meneliti pengaruh perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan serta implikasinya terhadap kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Hal ini diperlukan karena penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terserap memperoleh upah layak dan kesempatan kerja yang berkelanjutan, sehingga benar-benar mampu untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga miskin.

Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaruh Perkembangan Sektor Industri, Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat di ambil rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh perkembangan sektor industri pengolahan terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh perkembangan sektor industri pengolahan terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2023.

3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat sebagai sumber referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian sebelumnya, khusus yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang dalam hal ini adalah pengaruh perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti : mengembangkan pengalaman empiris serta wawasan penulis guna meningkatkan kompetensi di bidang penelitian ilmiah yang sejalan dalam bidang ekonomi pembangunan yakni pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. Bagi Akademis : memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan bagi civitas akademika di bidang ekonomi pembangunan, sekaligus menjadi kontribusi bagi dunia pendidikan.

3. Bagi Pembaca : memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kontribusi sektor industri dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga dapat memperkaya pengetahuan serta memperluas wawasan kritis pembaca terkait masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan.